

Analisis Penerapan *Cash Management System* (CMS) Dalam Mengembangkan Kinerja Profesionalisme Perangkat Desa di Kabupaten Sanggau

Ria Ananda^a

^aUniversitas Tanjungpura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

*Email : B2042202033@student.untan.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *Cash Management System* (CMS) Dalam Mengembangkan Kinerja Profesionalisme Perangkat Desa Di Kabupaten Sanggau. Hasil penelitian menyimpulkan: 1) Profesionalisme dari aspek kreatifitas dalam penerapan *Cash Management System* (CMS) belum bisa terlaksana, karena fasilitas internet belum memadai dan perlunya aparatur desa pendidikan dan pelatihan teknologi, 2) Profesionalisme dari aspek inovasi, bahwa aparatur desa sangat menginginkan dalam menerapkan *Cash Management System* (CMS) karena dapat mempermudah pekerjaan, namun karena tenaga ahli yang ada tidak mendukung sehingga desa belum bisa menerapkan sistem *Cash Management System* (CMS). Untuk itu desa mendorong aparatur desa belajar di Pemerintah Kabupaten maupun kecamatan dan pendamping-pendamping desa, dan 3) Profesionalisme dari aspek responsifitas, bahwa sarana prasarana terkait *Cash Management System* (CMS) masih dalam hal pemenuhan perangkat komputer baik *software* maupun *hardware*, namun ketersediaan jaringan komputer masih terbatas di beberapa daerah.

Kata Kunci: *Cash Management System* (CMS), Kinerja Profesionalisme, Perangkat Desa

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju pesat berdampak pada pola dan budaya kehidupan masyarakat. Teknologi informasi telah merubah kehidupan masyarakat dan memberikan kemudahan-kemudahan yang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna membantu dalam aktifitas setiap harinya (Ridwan dan Tarmizi, 2018).

Teknologi internet menawarkan pelayanan publik yang bisa diakses secara 24 jam, kapan pun, dan dari manapun pengguna berada. Internet juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara *face-to-face* sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Kabupaten Sanggau terdiri atas 15 (lima belas) kecamatan, yaitu: Toba, Meliau, Kapuas, Mukok, Jangkang, Bonti, Parindu, Tayan Hilir, Balai, Tayan Hulu, Kembayan, Beduwai, Noyan, Sekayam dan Entikong. Jika dilihat dari luas kecamatan, maka kecamatan terluas adalah Kecamatan Jangkang dengan luas 1.589,20 Km², kemudian Kecamatan Meliau yaitu 1.495,70 Km². Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Balai dengan luas 395,60 Km² kemudian Kecamatan Beduwai dengan luas 435,00 Km². Kecamatan Entikong dan Sekayam merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Serawak (Malaysia Timur). Kabupaten Sanggau memiliki 166 desa, 6 kelurahan dan 623 dusun.

Jarak yang cukup jauh yang harus ditempuh masyarakat desa ke Kecamatan dan Pusat Kota maka perlu penanganan khusus agar potensi daerah dapat disebarluaskan. Hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa bahwa bagian pegawai operator kepala urusan umum yang mengurus bagian informasi di pedesaan, mengatakan bahwa belum adanya sistem yang untuk menghubungkan data-data antara desa dan saling terintegrasi. Informasi seperti berita mengenai acara desa, agenda yang dilakukan oleh desa dan pengumuman, untuk menyebarkan suatu informasi, aparat desa membagikan poster dan surat edaran kepada masyarakat dan untuk pengumuman biasanya di tempatkan pada mading.

Lebih lanjut pegawai operator desa mengatakan bahwa:

1. Pengelolaan administrasi desa belum memiliki sistem yang dapat mengelola data secara keseluruhan seperti administrasi kependudukan, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, administrasi umum, dan administrasi lainnya.
2. Belum memiliki suatu sistem untuk memroses informasi desa seperti data kependudukan secara langsung dan saling terintegrasi yang dikarenakan pemutakhiran data kependudukan di lakukan setiap 6 bulan sekali oleh kecamatan.
3. Pada proses pengolahan data administrasi desa belum memiliki fasilitas untuk menyimpan suatu data dengan aman dan belum adanya sebuah informasi desa yang memberikan keseragaman informasi serta dapat di akses oleh masyarakat desa melalui teknologi internet.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang memanfaatkan layanan internet salah satunya dengan *Cash Management System (CMS)*. Penerapan *Cash Management System (CMS)* dipelukan profesionalisme perangkat desa. Profesionalisme merupakan cerminan dari keterampilan dan keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreatifitas. Menjalankan roda pemerintahan, pemerintah desa harus menerapkan prinsip profesionalisme kepada aparat yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku.

Profesionalisme merupakan cerminan kemampuan, keterampilan, dan keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan, aspek tingkah laku yang mencakup tingkat kreatifitas, inovasi, dan responsifitas dari aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Suryaningrat (2012) mengemukakan bahwa "Desa sebagai bahan keterangan dan sumber data dan bahan keterangan yang diperoleh dari desa seringkali digunakan untuk rencana daerah oleh karena itu

data buatan atau data keterangan harus dihindarkan karena dapat menggagalkan tujuan negara". Dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya, terutama yang berhubungan dengan tugas pemerintahan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang baik sehingga apa yang direncanakan dapat terealisasi dengan maksimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan *Cash Management System* (CMS) Dalam Mengembangkan Kinerja Profesionalisme Perangkat Desa Di Kabupaten Sanggau".

TINJAUAN PUSTAKA

***Cash Management System* (CMS)**

Cash Management System adalah sebuah layanan perbankan berbasis internet yang memungkinkan nasabah perusahaan atau instansi melakukan *monitoring* transaksi keuangan melalui fasilitas internet *online* setiap saat. Hal ini untuk menentukan efisiensi waktu dan biaya dalam pengelolaan pemerintahan dan kejelasan transaksi arus kas. Keputusan dapat diambil dengan cepat, tepat dan akurat sehingga peningkatan daya saing pemerintahan di era yang semakin dinamis seperti saat ini lebih terjamin (Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2018).

Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 910/1866/SI tanggal 17 april 2017 tentang Implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah provinsi dan Surat Edaran Mendagri No. 910/1867/SJ tanggal 17 april 2017 tentang Implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 2017).

Pengelolaan CMS tidak hanya untuk menghindari kebangkrutan, tetapi juga untuk mengurangi rata-rata piutang jangka panjang yang beredar, meningkatkan dalam hal penagihan serta meningkatkan transaksi non-tunai untuk meningkatkan posisi kas dan *profitabilitas* perusahaan (Mengenal Sistem Pengelolaan Keuangan Perusahaan (Cash Management System) Berbasis Perbankan, 2018b).

Profesionalisme

Siagian (2010) menyebutkan bahwa profesionalisme adalah keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang cepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan.

Sedarmayanti (2014) mengungkapkan bahwa, "Profesionalisme adalah suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan memerlukan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan tertentu dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan".

Menurut Siagian (2014) bahwa profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Artinya konsep profesionalisme dalam diri aparat diukur dari segi:

1. Kreatifitas (*creativity*)
2. Inovasi (*innovasi*)
3. Responsifitas (*responsivity*)

Konsep Desa

Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batasbatas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Nurcholis, 2011). Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam Melaksanakan Pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa. Tugas Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang di tetapkan bersama BPD
2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa
4. Mengajukan Rencana APBDes
5. Membina kehidupan Masyarakat Desa
6. Membina perekonomian Desa
7. Mengkoordinasi Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat
8. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
9. Ketentraman dan ketertiban
10. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes
11. Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa.

Konsep Aparatur Desa

UU no 5 Tahun 2014 Aparatur sipil Negara atau ASN mempunyai Fungsi, Tugas, dan Peran sebagai berikut:

1. Pasal 10, Pegawai ASN berfungsi sebagai:
 - a. Pelaksana kebijakan publik
 - b. Pelayan publik dan
 - c. Perekat dan pemersatu bangsa.
2. Pasal 11 Pegawai ASN bertugas:

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12, Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Handyaningrat (2012) yang disebut aparatur pemerintah ialah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Aspek-aspek administrasi itu terutama ialah kelembagaan atau organisasi dan kepegawaian. Aparatur Pemerintah merupakan perangkat/alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari, aparatur juga sebagai pelaksana roda birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah “Mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti” (Faisal, 2013). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sanggau. Waktu penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini 2 minggu. Subjek penelitian ini adalah perangkat desa. Teknik pengumpul data yang digunakan yaitu: wawancara, dan dokumentasi.

Miles dan Huberman dalam Rasyid (2000) analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan. Cara yang peneliti gunakan untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian adalah Ketekunan Pengamatan, Triangulasi dan *Member Check*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profesionalisme Dari Aspek Kreatifitas

Aparatur desa yang kreatif sangat diperlukan untuk kemajuan desa dan anggapan miring masyarakat terhadap kepemimpinannya yang dianggap kaku dalam bekerja. Aparatur yang kreatif dapat terjadi apabila adanya kesediaan pemimpin untuk memberdayakan bawahan antara lain melalui partisipasi dalam mengambil keputusan yang menyangkut pekerjaan, mutu hasil pekerjaan, karier dan penyelesaian permasalahan tugas.

1. Tanggapan informan mengenai bagaimana kemampuan aparatur menerapkan *Cash Management System* (CMS)

Hasil wawancara dengan aparatur desa Penyeladi mengatakan bahwa kemampuan dalam menerapkan *Cash Management System* (CMS) belum bisa terlaksana, karena tidak didukung oleh fasilitas yang ada di desa, untuk menerapkan

Cash Management System (CMS) harus di dukung oleh fasilitas internet, sedangkan di desa ini belum ada jaringan. Hal ini tentunya menjadi kendala dalam menerapkan *Cash Management System* (CMS), seharusnya sebelum menerapkan sistem ini, harus ada jaringan internet dulu.

2. Tanggapan informan mengenai bagaimana kemampuan aparatur desa dalam mengaplikasikan *Cash Management System* (CMS)

Pemerintahan desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan pengetahuan atau kemampuan dalam pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparatur desa. Dalam pemahaman teknologi informasi dan komunikasi di desa aparatur pemerintah tidak terlepas dari tingkat kematangan aparatur desa yang didalamnya menyangkut ketrampilan yang di peroleh dari pendidikan latihan dan pengalaman.

Hal ini disampaikan sekretaris desa Nanga Biang berpendapat sebagai berikut: “Jelasnya saat ini untuk semua aparatur desa masih dalam belajar untuk penggunaan teknologi, sehingga perlu adanya pelatihan apabila ingin menerapkan *Cash Management System* (CMS), kami sadar bahwa teknologi ini sangat perlu untuk kemajuan desa, namun adanya aplikasi jika tidak didukung dengan sumber daya yang handal, maka teknologi tersebut menjadi sia-sia karena tidak dapat dimanfaatkan” (Sumber: wawancara).

Dengan demikian, penerapan *Cash Management System* (CMS) akan timbul berbagai kebaikan atau masalah dalam penyelenggaraannya, untuk itu kemampuan aparatur desa dalam menganalisis teknologi atau aplikasi diperlukan karena menjadi perbaikan dalam penyelenggaraannya ke depan.

3. Tanggapan informan mengenai apa saja langkah-langkah yang di lakukan oleh aparatur desa dalam kemampuan aparatur desa dalam mengaplikasikan *Cash Management System* (CMS)

Berdasarkan analisa dan observasi peneliti dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa untuk menciptakan sebuah inovasi diperlukannya musyawarah supaya terciptanya ide-ide yang sifatnya membangun dan berkembang, tapi hal ini menurut peneliti belum terwujud dengan baik karena kemampuan aparatur desa dalam menciptakan ide untuk sebuah inovasi masih kurang baik.

Bendahara Desa Rambin mengatakan bahwa:

“Aparatur desa yang sudah berumur suruh menghadap laptop saja tidak mau, dana yang muda juga belum mampu menggunakan komputer atau laptop, karena pendidikan hanya tamatan SMA dan belum pernah mendapat pendidikan dan pelatihan menggunakan komputer”.

Tujuan pemerintahan dalam menerapkan *Cash Management System* (CMS) sebagai teknologi informasi dan komunikasi di desa, agar pengembangan sumber daya manusia di desa lebih mengenai sasaran, maka dalam *capacity building* perlu diperhatikan empat fase dasar sebagaimana Grindle dalam Djumadi (2004) menjelaskan:

1. Fase Desain (*a design phase*), meliputi keterlibatan pihak-pihak atau donor constituency tertentu yang bisa menghasilkan masukan (*resulting in*) bagi

strategi pengembangan sumber daya manusia, baik dari dalam maupun luar lembaga pemerintahan desa misalnya, kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum dan keuangan, dan kepala BPD

2. Fase implementasi proyek (*project implementation phase*) dimana menyeleksi kontraktor pelaksana atau unit-unit administrasi tertentu untuk memulai dan mengimplementasikan suatu program
3. Fase akuisisi kemampuan (*a acquisition phase*), dari berbagai kegiatan informal yang di dapat akan membentuk keahlian-keahlian baru termasuk mengasah wawasan, bakat, potensi, dan etos kerja.
4. Fase pencapaian atau kinerja (*performance phase*) di mana kemampuan individu akan peralihan tugas dan hasil evaluasi akhir.

Profesionalisme Dari Aspek Inovasi

Inovasi sebagai bentuk perwujudan dari kecakapan birokrasi dengan mengandalkan kreatifitas jajaran birokrasi untuk menciptakan model kerja baru yang bertujuan untuk mempermudah penyelenggaraan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi yang lebih jauh berupa penciptaan model kerja baru dalam penggunaan kemajuan teknologi untuk menambah wawasan pribadi para aparatur desa dan dalam merespon perubahan dari lingkungan.

1. Tanggapan Informan tentang sejauh mana keinginan aparatur desa dalam menggunakan *Cash Management System* (CMS)

Hasil analisa dan observasi peneliti dan wawancara dapat di simpulkan bahwa aparatur desa sangat menginginkan dalam menerapkan *Cash Management System* (CMS) karena dapat mempermudah pekerjaan, namun karena tenaga ahli yang ada tidak mendukung sehingga desa belum bisa menerapkan sistem *Cash Management System* (CMS).

Menurut Robbins and Judge (2009) Kemampuan Intelektual merupakan kemampuan yang dibutuhkan aparatur desa untuk melakukan berbagai aktifitas mental seperti berfikir, menalar dan memecahkan masalah. Aparatur yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi akan bertindak efisien dan efektif dalam memecahkan persoalan. Hal ini kemampuan intelektual aparatur desa di dalam pemahaman teknologi informasi dan komunikasi menjadi penting di desa karena di desa di tuntut menjadi pelopor pelayanan prima kepada masyarakat menggunakan teknologi yang berbentuk aplikasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat maupun pemerintahan desa.

2. Tanggapan informan tentang keinginan aparatur desa untuk berkembang dan mengembangkan diri dalam pelaksanaan tugas

Hasil analisa dan observasi peneliti dan wawancara dapat di simpulkan bahwa keinginan aparatur desa untuk berkembang dan mengembangkan potensi diri dalam pelaksanaan tugas masih kurang, karena aparatur desa sudah tua dan kemampuan fisik untuk melakukan aktivitas juga terbatas, seharusnya aparatur desa yang sudah tua harus diganti dengan yang lebih muda. Untuk ketrampilan

semua aparatur desa sedang dalam tahap belajar dan mungkin terus untuk selalu belajar dimanapun di Pemerintah Kabupaten maupun kecamatan dan pendamping-pendamping desa (Sumber: Wawancara).

Menurut Robbins and Judge (2009) kekuatan fisik merupakan kemampuan untuk menggunakan kekuatan otot secara berulang-ulang atau sinambung sepanjang suatu kurun waktu dan kemampuan melanjutkan upaya maksimum yang menuntut upaya yang sepanjang kurun waktu. Keterbatasan perangkat desa dalam menjalankan kewajiban pelayanan sangat berpengaruh terhadap kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas roda pemerintahan desa. Hal ini jika dilihat dari kemampuan fisik di bedakan menjadi 4 tugas tugas yang harus di kerjakan oleh aparatur desa yakni ketrampilan, kekuatan, kecepatan, dan ketepatan hal ini sangat berpengaruh dalam pekerjaan pemerintahan desa karena semua itu menunjukkan kualitas aparatur desa.

Slameto (2010) mengatakan bahwa kemampuan merupakan kecakapan yang terdiri dari beberapa jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan kedalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Hal yang menjadi masalah kemampuan fisik aparatur desa juga menjadi hal terpenting dalam kedepannya Pemerintahannya yakni gangguan atau masalah dalam aplikasi yang sudah menggunakan jaringan internet. Hal ini diperlukan pengembangan pengalaman pelatihan aparatur desa yang harus diperjelas dalam kebijakan oleh pemerintah desa.

Profesionalisme Dari Aspek Responsifitas

Kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1. Tanggapan Informan tentang seperti apa layanan IT

Layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat di semua desa/kelurahan sama. Dengan kemajuan teknologi, harapannya dapat diterapkan untuk layanan di desa/kelurahan. Kebutuhan akan layanan masyarakat yang ada di desa adalah terkait dengan layanan administrasi kependudukan, diantaranya:

- a. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b. KK (Kartu Keluarga)
- c. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)
- d. Surat Keterangan Usaha
- e. Surat Waris
- f. Surat Keterangan Pindah
- g. Surat Keterangan Domisili
- h. SKCK (Surat Keterangan Cacat Kriminal)
- i. Dan surat-surat lainnya.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Aparat Birokrasi Kelurahan/Desa dalam mengoptimalkan kegiatan Pemerintahan Desa meliputi permasalahan internal yang berupa ketatalaksanaan, sumber daya manusia atau kompetensi Aparat Pemerintah Kelurahan/Desa, ketatalaksanaan, penggunaan teknologi administrasi yang masih kurang, dan manajemen birokrasi itu sendiri (Lulita, 2011).

Jadi, SDM merupakan kendala utama dalam mengaplikasikan IT melalui sistem *Cash Management System* (CMS). Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan kemampuan dibidang perencanaan pembangunan dan pemberian pelayanan yang baik dan berkualitas oleh para aparatur desa/kelurahan kepada masyarakat.

2. Tanggapan informan tentang seperti sarana dan prasarana yang diperlukan

Hasil analisa dan observasi peneliti dan wawancara dapat di simpulkan bahwa sarana dan prasarana pendukung sistem *Cash Management System* (CMS) sangat terbatas, seperti layanan internet terbatas. Sarana teknologi dan pendukungnya merupakan fokus dari pelayanan yang berbasis IT, semakin canggih sarana IT maka semakin bagus layanan yang dapat diberikan pada masyarakat. Sesuai dengan pendapat (Charalabidis et al, 2006).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Profesionalisme Dari Aspek Kreatifitas

Penerapan *Cash Management System* (CMS) belum bisa terlaksana, karena fasilitas internet belum memadai dan perlunya aparatur desa pendidikan dan pelatihan teknologi.

2. Profesionalisme Dari Aspek Inovasi

Aparatur desa sangat menginginkan dalam menerapkan *Cash Management System* (CMS) karena dapat mempermudah pekerjaan, namun karena tenaga ahli yang ada tidak mendukung sehingga desa belum bisa menerapkan sistem *Cash Management System* (CMS). Untuk itu desa mendorong aparatur desa belajar di Pemerintah Kabupaten maupun kecamatan dan pendamping-pendamping desa

3. Profesionalisme Dari Aspek Responsifitas

Sarana prasarana terkait *Management System* (CMS) masih dalam hal pemenuhan perangkat komputer baik *software* maupun *hardware*, namun ketersediaan jaringan komputer masih terbatas di beberapa daerah.

REFERENSI

Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2018.

- Djumadi, 2004. *Hukum Pemburuan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Faisal, Sanafiah. 2013. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Handayaniingrat, Soewarno. 2012. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji masagung
- Lulita, M. C. 2011. *Kinerja Birokrasi Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Umum Di Desa Cukurgondang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan*. Diakses melalui: <http://library.um.ac.id/freeCASTs/index.php/pub/detail/kinerjabirokrasi-desa-dalam-meningkatkanpelayanan-umum-di-esacukurgondang-kecamatan-gratikabupaten-pasuruan-mega-clara-lulita-48942>.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Rasyid, 2000. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Robbins, S. P. and Judge, T. A. 2009. *Organizational Behavior (London: Pearson International Edition)*. 13th Edition.
- Sedarmayanti. 2014. *Membangun Manajemen Sistem Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 2004. *Patologi Birokrasi*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Slameto, 2010. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- UU no 5 Tahun 2014 Aparatur sipil Negara atau ASN
- UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa